



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 16 Juni 2025

Halaman: 2

Kader Posyandu Ikut Dapat Jaminan Ketenagakerjaan

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berupaya memperhatikan jaminan sosial para kadernya hingga lapisan paling bawah. Kini, tak hanya ketua RT/RW saja yang mendapat jaminan ketenagakerjaan. Namun juga kader posyandu.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jogjakarta Rudi Susanto menjelaskan, Pemkot Jogja telah mendaftarkan kader posyandu sejak Januari lalu. Sedangkan untuk RT/RW, terhitung sejak 2023.

Menurutnya, kader PKK hingga penyuluh KB juga ikut didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga total pekerja lapisan paling bawah yang mendapatkan jaminan tersebut sekitar 7.000 penerima manfaat.

"Didaftarkan untuk dua perlindungan, yakni kecelakaan kerja dan kematian," ujar Rudi saat dikonfirmasi kemarin (15/6).

Program tersebut, lanjutnya, dapat dianggap sebagai program bantuan. Namun, pekerja yang mendapatkan fasilitas itu hanya diberikan kepada pegawai yang bersinggungan dengan Pemkot Jogja.

Fasilitas yang diberikan yakni mereka dibebaskan dari iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya. Nominal iuran sama dengan peserta umum yakni persentase dari upah yang diterima.

"Kalau kecelakaan kerja kan 0,24 persen, kalau kematian 0,3 persen dari UMK," tuturnya.

Upah yang diterima para pekerja tersebut memang tidak rutin setiap bulan didapatkan. Maka dari itu, untuk menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan patokan UMP/UMK setempat.

Selain di Kota Jogja, menurutnya daerah lain juga sudah mendaftarkan jaminan ketenagakerjaan bagi bidang pekerjaan yang merupakan kepanjangan tangan pemkab/pemkot tingkat desa. Contohnya seperti di Kabupaten Sleman yang juga telah mendaftarkan anggota Satlinmas dan kader PKK. "Bantul dalam proses, jadi belum," ucapnya.

Sementara di Kabupaten Kulon Progo, pemkab telah mendaftarkan para 2.000 penderes kelapa dari 2022. Kemudian untuk Kabupaten Gunungkidul, baru anggota Bawaslu yang telah didaftarkan. "Paling banyak kepesertaan dari Kota Jogja," ucapnya.

Kebijakan tersebut murni dari masing-masing pemkab/pemkot. Biasanya, menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Manfaat atas jaminan kematian itu sebesar Rp 42 juta. "Dengan iuran sekitar Rp 11 ribu per bulan untuk satu orang," ujarnya.

Program tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 yang meng-

amanahkan kepada pemerintah daerah untuk optimalisasi perlindungan jaminan ketenagakerjaan. Salah satu instrumen untuk mengangkat kemiskinan ekstrem yakni perlindungan jaminan sosial.

"Bisa melalui bantuan sosial dan bantuan ketenagakerjaan," katanya.

Ketua RW 03 Tahunan, Umbulharjo, Jogja Helmi Rakhman mengaku, telah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan tersebut. Berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian. "RW dapat, kalau ibu-ibu kader coba nanti saya cek," ujarnya.

Menurutnya, jaminan tersebut cukup membantu. Sehingga selama ketugasan pelayanan masyarakat ketua RW/RT dan PKK tidak khawatir. "Meski berharapnya tidak digunakan kartu tersebut," tuturnya. (oso/eno/zi)



AGUNG DWI PRAKOSO/RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005